

63 Tahun “Ritual” Kemerdekaan Indonesia

oleh

Joeni Arianto Kurniawan¹

Bulan Agustus telah tiba, seperti biasa hingar-bingar perayaan dirgahayu Indonesia pun mulai membahana di pelosok negeri. Dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa, kampung, kelurahan, semua seakan tak mau ketinggalan dalam merayakan HUT kemerdekaan negeri ini, walaupun jika melihat kondisi riil yang sedang berlangsung saat ini segala hal di atas patut dipertanyakan.

Pernahkah kita bertanya, mengapa para pejuang dan pendiri negara ini dalam perjuangannya menyuarakan jargon kemerdekaan atau pelek merdeka dan bukan kata atau terminologi yang lain seperti halnya jargon kebebasan (*liberty*) sebagaimana yang disuarakan oleh negara-negara barat? Sudah barang tentu terdapat latar belakang sosiologis antara bangsa kita dengan bangsa barat dimana bangsa barat adalah bangsa yang lebih bercorak individualis sedangkan bangsa kita lebih kepada komunalistis. Namun, alasan penggunaan istilah kemerdekaan ini sesungguhnya lebih kepada persoalan filosofis. Konon, kata merdeka berasal dari kata *mahardika* (sansekerta), yaitu suatu tahapan puncak dalam kehidupan spiritual seorang manusia dimana ia telah mencapai kemuliaan dan menemukan jati diri yang hakiki sebagai manusia. Dari sini kita bisa pahami mengapa para pendiri negara ini lebih suka menggunakan istilah merdeka dari pada istilah bebas, karena –sangat dimungkinkan- para nenek moyang kita pendiri negara ini menginginkan agar dengan bebasnya Indonesia dari cengkraman imperialisme negara asing (Belanda dan Jepang kala itu) maka hal itu dapat mengantarkan rakyat Indonesia kepada tahapan ke-*mahardika-an*, tahapan dimana manusia-manusia Indonesia mencapai kemuliaannya.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan umur 63 tahun kemerdekaan Indonesia ini dapat diartikan sebagai 63 tahun bangsa Indonesia berada dalam kemuliaannya sehingga kita memang benar-benar pantas ramai-ramai bertasyakur (baca: merayakan) atas 63 tahun umur kemerdekaan ini?

Kemuliaan kiranya dapat didefinisikan sebagai tahapan yang bisa dicapai suatu makhluk (manusia) dalam memenuhi fitrah (hakekat) tertinggi dalam keberadaan atau eksistensinya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Pertanyaannya, apakah fitrah tertinggi dalam keberadaan sebagai manusia ini telah dapat dicapai oleh manusia-manusia Indonesia secara kolektif (bersama sebagai suatu bangsa)?

Jika melihat pada tataran realitas yang terjadi, tampaknya apa yang ada dalam konsep kemuliaan sebagaimana yang dijabarkan di atas masih jauh panggang dari api. Berbagai persoalan pelik nan rumit masih melilit bangsa ini secara tak berkesudahan. Pada tataran kesejahteraan, apa yang terjadi dewasa ini sungguh menjauhkan cita-cita sebagai bangsa yang sejahtera dari gapaian tangan-tangan rakyat Indonesia. Tingkat inflasi yang tinggi, rendahnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran, rendahnya upah buruh, munculnya fenomena-fenomena busung lapar, bahkan hingga kasus matinya beberapa anak di daerah karena kelaparan, adalah fakta kontras nan mencolok yang menunjukkan masih jauhnya kita dari garis negara kesejahteraan (*welfare state*). Ditambah lagi adanya fakta yang menunjukkan naikknya populasi masyarakat miskin kota (*urban poor*) seperti gelandangan, pengemis, hingga anak-anak jalanan, semakin mempertegas keberadaan negara Indonesia sebagai salah satu negara miskin dunia (baca: negara dimana sebagian besar penduduknya masih berjuang mati-matian hanya untuk sekedar bertahan hidup secara minimal), walaupun dalam tataran lebih lanjut apa yang sesungguhnya terjadi tersebut berusaha oleh beberapa pihak ditutupi dengan berbagai macam “kosmetik” kamufase ala negara berkembang seperti halnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan (*mall*) secara masif, pembentukan gaya hidup konsumtif masyarakat perkotaan,

¹ Pemerhati masalah sosial, staf pengajar pada Fakultas Hukum Unair.

dan sejenisnya. Jika keberadaan bangsa ini secara garis besar dapat disimpulkan masih terperangkap dalam penjara kemiskinan, dimana dalam hal ini memaksa manusia-manusia yang ada dalam bangsa tersebut harus terus bergelut keras hanya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling dasar, maka tentu sulit dapat dikatakan fitrah tertinggi keberadaan suatu bangsa secara lahiriah telah tercapai.

Di sisi lain, moralitas dan etika bangsa ini juga sedang mengalami erosi hingga mencapai tahapan yang sangat kritis. Para pejabat, yang seharusnya dapat menjadi figur contoh tauladan dan pelayan yang baik bagi masyarakatnya, justru ramai-ramai mencoreng martabat mereka sendiri dengan tanpa empati sama sekali melakukan pencurian dan perampokan uang rakyat dengan jumlah yang sungguh fantastis di saat para rakyat pemilik kekayaan itu sedang bergelut dengan kelaparan. Begitu kritis dan kronisnya erosi moralitas dan etika yang terjadi, sifat koruptif ini kini cenderung sudah tidak dimonopoli oleh para pejabat saja, melainkan juga telah menular nan menjalar ke masyarakat awam juga. Puncaknya, budaya korupsi seakan menjadi budaya patogen yang tak tertangani lagi ketika lembaga peradilan sebagai manifestasi satu-satunya benteng terakhir penegakan moralitas masyarakat melalui perangkat hukum telah berubah tak ubahnya menjadi suatu mafia, yakni organisasi yang secara sistemik "memproduksi" kejahatan itu sendiri. Kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan seharusnya dapat dijadikan cermin bom waktu kehancuran negeri ini, mengingat jika pelanggaran hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, kemana lagi dapat diharapkan ada pihak yang mampu menegakkan hukum sehingga tercipta keadilan dan keteraturan sebagai prasyarat eksistensi dari suatu masyarakat? Gambaran ini kiranya dapat menunjukkan kepada kita bahwa jika fitrah tertinggi keberadaan suatu bangsa secara lahiriah masihlah jauh dari gapaian bangsa Indonesia secara keseluruhan (bukan individu-individu), maka begitu pula yang terjadi secara batiniah pada diri manusia-manusia Indonesia, dan itu artinya kita masih sangat jauh dari garis tataran kemuliaan suatu bangsa.

Jika telah begini, maka sangatlah tidak pantas kita menyebutkan diri sebagai bangsa yang merdeka sebagaimana yang dicita-citakan para nenek moyang pendiri negara ini, yakni bangsa yang telah mencapai ke-*mahardika*-annya (kemuliaannya). Dan tentu, kiranya tidak pantas pula kita dengan berbangga diri secara gagap gempita mengadakan berbagai hingar-bingar perayaan kemerdekaan negeri ini, karena pada hakekatnya kita sama sekali masih jauh dari itu. Kita, mungkin, telah mencapai tahap kebebasan (*freedom, liberty*) dari imperialisme fisik, namun sama sekali belum mencapai fase kemerdekaan. Jika memang demikian, secara bijak seharusnya kita melakukan refleksi mendalam sembari bertanya, apakah arti segala macam peringatan 63 tahun kemerdekaan ini jika hal itu sesungguhnya palsu karena kita sama sekali belum mencapainya? Apakah kita sudah cukup senang melakukan semua itu hanya sebatas ritual semata yang kering tanpa makna dan esensi mengingat esensi itu masih belum mampu kita capai? Bukankah itu sama artinya kita bangsa yang membohongi diri sendiri?

"Menuju revolusi bangsa Indonesia."